



Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui LPPM Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Ahmad Wahyudi^{1*}, A Bachrun Rifa'i¹, Irfan Sanusi²

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : hiahnadd12@gmail.com

ABSTRAK

Umat Islam di Indonesia menghadapi sejumlah persoalan, salah satunya adalah pada bidang ekonomi. Oleh karena itu, LPPM BAZNAS Jawa Barat membuat salah satu program dalam rangka pemberdayaan zakat melalui program Madani, program yang lebih menekankan aspek kemandirian dan pengembangan potensi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi pemberdayaan, tahapan-tahapan dan hasil pemberdayaan dalam Program Madani. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Madani ini berhasil dalam meningkatkan kualitas ekonomi mustahik melalui berbagai cara yang dilakukan pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat yakni pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan pengadaan fasilitas penunjang. Kemudian terpenuhi dengan baik proses tahapan mulai dari social mapping, pemberkasan, inkubasi pra Usaha, input aset produktif, dan monitoring program Madani. Hasil Program Madani dapat dilihat adanya perubahan dalam diri mustahik, perbaikan ekonomi mustahik dan mustahik lebih produktif dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dapat menjadikan mustahik lebih berdaya.

Kata Kunci : Baznas; LPPM; Ekonomi; Pemberdayaan.

ABSTRACT

Muslims in Indonesia face a number of problems, one of which is in the economic field. Therefore, LPPM BAZNAS West Java developed a program in the context of empowering zakat through the Madani program, a program that emphasizes the aspects of independence and developing community potential. The purpose of this study is to determine the empowerment strategy, stages, and results of empowerment in the Madani Program. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. with data collection techniques, namely

observation, interviews, and documentation studies. Based on the results of the research, it shows that the Madani Program is successful in improving the economic quality of Mustabik through various methods carried out by the West Java BAZNAS LPPM, namely developing human resources, institutions, and procuring supporting facilities. Then the stages of the process are well fulfilled, starting from social mapping, filing, pre-business incubation, productive asset input, and monitoring of the Madani program. The results of the Madani Program can be seen in the fact that there are changes in mustabik, economic improvements for mustabik, and mustabik becoming more productive by utilizing their potential, which can make mustabik more empowered.

Keywords : *Baznas; LPPM; Economy; Empowerment.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar dan klasik yang mengakibatkan pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan adalah masalah yang ditimbulkan baik oleh keadaan domestik maupun internasional di suatu negara. Globalisasi ekonomi dan keterkaitan antar negara yang semakin meningkat menghadirkan peluang dan tantangan bagi pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga membawa bahaya dan ketidakpastian tentang arah ekonomi global. Salah satu problem utama yang menarik perhatian pemerintah di setiap negara adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang ditimbulkan baik oleh keadaan domestik maupun internasional di suatu negara. Globalisasi ekonomi dan tumbuhnya saling terikat antar negara menghadirkan tantangan dan peluang bagi kemajuan ekonomi suatu negara, tetapi juga membawa risiko (Suprijanto, A. 2011 :10).

Suatu negara dikatakan miskin menurut Munir, B. (2002), jika memiliki pendapatan perkapita yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), sebagian besar pegawainya bekerja di bidang pertanian, dan terperosok dalam lingkaran kemiskinan. Tahapan pembangunan membutuhkan negara yang kaya dan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Kemiskinan di negara berkembang merupakan masalah yang sangat serius yang sulit untuk dipecahkan. Meskipun mayoritas negara berkembang telah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang tinggi, telah terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antara si kaya dan si miskin, yang menyebabkan peningkatan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu elemen kunci yang menentukan seberapa sejahtera suatu masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai tingkat maksimum dalam hal tingkat penggunaan penuh tenaga kerja yang dapat dicapai. Pengangguran yang tinggi akan berdampak merugikan dalam jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial dan prospek ekonomi suatu bangsa.

Potensi pertanian yang tinggi serta kemiskinan yang meluas dikaitkan dengan masyarakat pedesaan. Sebagian besar penduduk pedesaan tergantung pada industri pertanian, termasuk sub-sektor peternakan, untuk penghidupan mereka. Kebutuhan konsumsi hewan ternak yang terus meningkat menjadi permasalahan subsektor peternakan saat ini, namun produksi dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan, sehingga pemenuhan kebutuhan dilakukan melalui impor. Masalah ini adalah hasil dari masalah pelemahan internal yang tidak diketahui (Zulpikri,R. 2022)

Peningkatan pendapatan keluarga memiliki hubungan yang paling kuat dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Dengan latar belakang pendapatan rumah tangga yang meningkat, sektor peternakan menjadi tumpuan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Peternakan merupakan salah satu pilar pengentasan kemiskinan. Melihat potensi kabupaten Sumedang di sektor peternakan, maka diadakan kegiatan dalam Program Pemberdayaan Peternak Mustahik Baznas Jawa Barat. Dalam program ini berharap dapat menumbuhkan kualitas dan kemandirian potensi serta sumber daya manusia di kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat, maka pada tahun 2021 dibentuk LPPM (Lembaga Pemberdayaan Petani Mustahik). Hal ini diantisipasi bahwa Barat akan menjadi kendaraan yang sukses untuk melaksanakan zakat, khususnya di bidang zakat ternak untuk meningkatkan ekonomi lokal dan individu. Pada tahun-tahun awal keberadaannya, LPPM akan melakukan program pemberdayaan bekerja sama dengan klaster model atau usaha peternakan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan keberlanjutan peternak melalui pemanfaatan teknologi dan pengelolaan usaha yang efektif. Peternak Mustahik akan diberikan peralatan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi, spiritual, dan agama.

Kegiatan di Balai Peternakan melaksanakan program pemberdayaan penerima zakat dan penguatan ekonomi dalam bidang peternakan. Pusat sektor peternakan menggabungkan kekuatan bersama peternak mustahik di sektor ini konsep pemberdayaan berupa sentra ternak dengan mengupayakan serta meningkatkan populasi dan menjaga kestabilan pasokan ternak nasional. Kemudian menurut Widiono selaku Ketua Lembaga Program Pemberdayaan Mustahik BAZNAS, mengungkapkan bahwasanya program ini telah disediakan berupa kandang, kambing, dan pelatihan mengenai tata kelola pemberdayaan ternak kambing tersebut.

Pemberdayaan peternak mustahik memiliki konsep mencakup dukungan

untuk menyertakan mustahik sebagai aktor. Cara yang diimplementasikan merupakan pengembangan aspek ekonomi mustahik dengan menyediakan fasilitas peternakan serta aset produksi berupa domba, kambing, dan sapi. Program ini bertujuan untuk peternak mustahik mewujudkan tiga prinsip swasembada, yaitu keberdayaan ekonomi, pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan mental serta spiritual. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Konsep mengenai kekuasaan merupakan ide utama dalam hal pemberdayaan (Aziz, R. 2010:124)

Memanfaatkan program-program, seperti yang bertumpu pada ranah sosial untuk memajukan masa depan, potensi mustahik dapat dikembangkan. Oleh karena itu, meskipun pendapatan mungkin tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, para mustahik tidak perlu khawatir tentang berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk pengeluaran. Program-program yang memudahkan mustahik untuk dilaksanakan dapat meringankan bebannya. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi usaha peternakan dan pengelolaan kambing yang menggiurkan dengan memperkenalkan peternakan dari hulu-hilir. Sistem ini adalah pola pengerjaan hasil ternak, mulai dari penyiapan makan untuk ternak hingga pengolahan dan penjualan hasil ternak.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi serta perbandingan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, penelitian Ahmada, Z. R. (2019) yang berjudul “Model Pemberdayaan Peternak Sapi Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Wilayah 7 Kroya Studi Di Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap”. Kajian ini memadukan konsep pemberdayaan peternakan sapi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dengan kawasan Kroya Desa Widarapayung Wetan Penelitian ini mendukung (1) model pemberdayaan peternak sapi di Kecamatan Binangun, Desa Widarapayung Wetan, Kabupaten Cilacap, dan (2) memahami pelaksanaan persetujuan peternak oleh Dinas Pertanian Cilacap untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambatnya. *Kedua*, dalam penelitian Anwar, C. (2021) yang berjudul “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun “. Penelitian ini menjelaskan salah satu program yang ada di Dompot Dhuafa Madiun yaitu penyaluran zakat melalui zakat produktif kampung ternak yang berada di Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Program ini dimulai pada tahun 2019 dengan diadakannya kerja sama dengan Dompot Dhuafa Madiun. Pemberdayaan ternak kambing merupakan salah satu jenis usaha yang menjanjikan karena kebutuhan kambing dalam momen Idul Adha yang menjadi kebutuhan setiap tahunnya, dengan uraian diatas yang mendasari Dompot Dhuafa Madiun untuk membentuk program Kampung Ternak.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini memiliki keunggulan atau unsur kebaruan karena perbedaan objek penelitian dengan cakupan yang lebih

luas yaitu lembaga Pemberdayaan Peternakan Mustahik (LPPM) dengan rata-rata cakupan kabupaten/kota. Karena mayoritas penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu di Bank Sampah dengan rata-rata cakupan hanya satu wilayah atau desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini difokuskan pada bebrapa point yang akan dikaji diantaranya yaitu: 1) Bagaimana strategi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan peternakan mustahik di Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkreta Kabupaten Sumedang ? 2) Bagaimana tahapan dalam program pemberdayaan peternakan mustahik di Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkreta Kabupaten Sumedang ? 3) Bagaimana hasil dalam program pemberdayaan peternakan mustahik di Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkreta Kabupaten Sumedang ?

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Pada metode deskriptif rumusan masalah digunakan untuk mengarahkan penelitian guna mengambil atau mencari suatu kondisi sosial yang akan diteliti dengan rinci dan utuh Azhari, M. T., dkk (2019). Metode ini mendeskripsikan hasil dari analisis di lokasi penelitian mengenai pelaksanaan program Madani di Kabupaten Sumedang dalam memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan peternakan. Untuk memperoleh data yang prosedural, teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

LANDASAN TEORITIS

Teori yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu komponen-komponen untuk memecahkan suatu permasalahan, serta dapat mempermudah dalam memahami tujuan atau maksud dari judul penelitian ini. Adapun konsep utama yang dikaji pada penelitian ini diantaranya yaitu: pemberdayaan, mustahik, peternakan, dan pertumbuhan ekonomi.

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari akar kata “daya” yang berarti kekuatan dan dapat juga berarti kekuatan atau kapasitas. Suatu proses memperoleh kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan, atau suatu proses pemberian daya, kekuatan, atau kemampuan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak-pihak yang kurang berkuasa atau belum diberdayakan, keduanya dianggap sebagai bentuk-bentuk pemberdayaan. Hal ini terutama berlaku di daerah pedesaan. Agar masyarakat dapat bertahan dan berkembang secara mandiri baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, keagamaan, dan budaya (Aziz, R. 2010:91).

Menurut Sulistiyani, A. T. (2004:89) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yaitu mengembangkan (enabling), meningkatkan

potensi atau daya (*empowering*), dan membina kemandirian merupakan tiga komponen pemberdayaan masyarakat. Tujuan dalam sebuah pemberdayaan tidak lain untuk menciptakan dan membentuk masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud meliputi kemampuan berpikir, melakukan tindakan dan pengendalian sosial atas apa yang hendak mereka lakukan. Masyarakat yang mandiri adalah kondisi dimana masyarakat tersebut dianggap mampu untuk hidup secara mandiri tanpa ada intervensi dari pihak luar dan ditandai dengan kemampuan berpikir yang mampu mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu yang tepat untuk memecahkan permasalahan – permasalahan yang ada di lingkungannya dengan daya kemampuan seperti konatif, kognitif, psikomotorik dan afektif dengan menggunakan sumberdaya yang ada di lingkungannya sendiri.

Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan agar masyarakat dapat menumbuhkan kekuatannya secara kreatif dan memiliki kesadaran kritis, mereka harus berpartisipasi aktif dan terlibat dalam pembangunan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, mereka yang mampu mendorong keberhasilan pembangunan pada tingkat individu dan kelembagaan harus berusaha dengan maksimal (Hikmat, H., 2004).

Theresia, A., dkk. (2015:124) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu proses keikutsertaan yang membangun kepercayaan dan peluang bagi masyarakat guna menilai tantangan utama untuk pengembangan mereka serta mengusulkan program yang disusun untuk mengatasi masalah yang ada. Program ini selanjutnya dijadikan basis program-program daerah, regional, bahkan nasional. Pemahaman ini menjelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh masyarakat, dan lembaga pendukung hanya berperan sebagai fasilitator. Lalu menurut Purnamasari, S. D., & Ma'ruf, M. F. (2020), terdapat empat prinsip pemberdayaan yaitu, panduan kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan sering digunakan untuk keberhasilan program pemberdayaan.

Melalui proses perolehan keterampilan progresif dan pembelajaran terus-menerus, kemandirian masyarakat tercapai. Dengan kata lain, melalui proses belajar, mereka akan mengembangkan keterampilan daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan sebagai proses pembelajaran adalah untuk mengembangkan kekuatan (potensi) dan keterampilan yang ada pada setiap individu maupun kelompok (Awang, A., 2010:47).

Menurut Aflah, N. (2009:178) Pengertian *mustahik*, atau golongan penerima zakat, memerlukan kontekstualisasi dan reinterpretasi agar dapat disesuaikan dengan berbagai keadaan sosial dan ekonomi setempat pada saat itu. Selain mengantisipasi siapa yang seharusnya menerima zakat tetapi tidak karena

kesalahpahaman atau mungkin definisi yang terlalu kaku yang dibuat oleh para ahli dalam teks-teks fiqh klasik yang membuat mereka tidak tersentuh oleh lembaga zakat, mereka juga gagal menerima bagian yang menjadi haknya.

Manshur, F. (2009) mengemukakan bahwa peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut, peternak hendaknya menerapkan sapta usaha ternak yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran.

Tujuan peternakan adalah untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan konsep manajemen dengan parameter produksi yang telah dicampur dengan cara terbaik. Pemberdayaan peternak mustahik memiliki konsep mencakup dukungan untuk menyertakan mustahik sebagai aktor. Cara yang diimplementasikan merupakan pengembangan aspek ekonomi mustahik dengan menyediakan fasilitas peternakan serta aset produksi berupa domba, kambing, dan sapi. Program ini bertujuan untuk peternak mustahik mewujudkan tiga prinsip swasembada, yaitu keberdayaan ekonomi, pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan mental serta spiritual.

Sukirno, S. (2002:10) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perluasan kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terjadi selama kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa meningkat dari satu periode ke periode berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemberdayaan peternakan Mustahik (LPPM) tidak bisa dipisahkan dari pembangunan peternakan. Kemampuan untuk memandang ternak tidak hanya sebagai makhluk hidup tetapi juga sebagai sumber daya, komoditas, dan produk merupakan landasan pengembangan peternakan holistik. Selain itu, kemampuan untuk memahami bahwa peternak bukan hanya makhluk sosial atau budaya, tetapi juga makhluk ekonomi dan ukhrawi yang perlu dibekali dengan berbagai kompetensi (penuh keterampilan), kemampuan mental yang baik, dan kualitas spiritual yang baik (iman dan taqwa) untuk mencapai kesejahteraan fisik dan mental.

Kemudian dalam bentuk usaha rakyat, sektor usaha peternakan untuk semua komoditas peternakan dalam negeri sebagian besar masih utuh. Salah satunya adalah usaha ternak domba, unggas lokal, dan sapi potong. Ironisnya industri peternakan adalah rendahnya tingkat pendidikan peternak, pendapatan

rendah, penggunaan manajemen dan teknologi yang rendah.

Sifat-sifat tersebut berkembang menjadi persoalan pelik yang terus melumpuhkan para pelaku usaha petani, sehingga menjadi tantangan bagi peningkatan kesejahteraan. Selain itu, hal ini juga menghambat produksi ternak yang berdaya saing sehingga menurunkan derajat peternak lokal. Ini mungkin termasuk dalam kategori penerima zakat atau berkembang menjadi peternak mustahik. Untuk memberdayakan petani yang berkelanjutan, peternak mustahik harus memahami gagasan pembangunan peternakan itu sendiri.

Secara konseptual, peternak yang mengikuti program Madani akan terdorong untuk mengembangkan usahanya guna mengubah operasinya menjadi perusahaan peternakan rakyat melalui peningkatan produktivitas dan kelayakan komersial. Peternak mendapatkan dukungan bisnis berupa manajemen teknis budidaya domba sesuai dengan prinsip-prinsip praktik peternakan yang baik untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memelihara hewan dan mempertahankan produk berkualitas tinggi. Dalam hal ini, program pendampingan usaha akan mendapatkan bantuan melalui berbagai inisiatif, antara lain pendidikan dan pelatihan (inkubasi) pra-usaha, program pendampingan, kegiatan pembelajaran online, dan pelaporan evaluasi produksi.

Program ini bertujuan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi usaha peternakan dan pengelolaan kambing yang menggiurkan dengan memperkenalkan peternakan dari hulu-hilir. Sistem ini adalah pola pengolahan hasil ternak, mulai dari penyiapan pakan hingga pengolahan dan penjualan hasil ternak. Tujuan lain dari program ini untuk menciptakan peternak yang kuat dan cakap di semua tingkatan-mental, spiritual, ilmiah, dan ekonomi sehingga memiliki pemahaman tentang peternakan.

Kemudian sasaran program Madani yaitu sebuah inisiatif pemberdayaan tersebar merata di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan ketakwaan agama petani, terbentuknya kelompok peternak yang berbakti kepada Baznas dan masyarakat secara keseluruhan, dan kolaborasi mitra strategis jangka pendek dan jangka panjang dalam mencapai tujuan dan misi lembaga.

Dengan visi Terwujudnya Jabar Jabar Juara Batin Hasil Seleksi Pengelola Zakat Unggul dan Berdaya Saing Berprestasi Nasional. Selain itu, "PRISMA" (Profesional, Responsif, Integritas, Sinergi, Maslahat dan Adil) menjadi motto Baznas Provinsi Jawa Barat.

Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Peternakan Mustahik

Pemberdayaan yang melibatkan peternak mustahik di Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wujud strategi pemberdayaan masyarakat yang direalisasikan oleh BAZNAS kepada masyarakat. Selaras dengan pendapat Suharto, E. (2009:58) bahwa pemberdayaan sebagai sebuah proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dan kekuatan dari masyarakat yang tergolong dalam kondisi lemah, termasuk didalamnya individu yang mengalami kondisi kemiskinan.

Masyarakat memiliki peran partisipasi secara aktif dalam kontribusinya melalui program ini, pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Menurut Sastropoetro, A. S. (1988:13) partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (Charity). Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, menurut Kartasasmita, G. (1996:20) dimulai dari sebuah perencanaan yang merupakan titik acuan berjalannya sebuah strategi, pada tahap perencanaan merupakan tahap pertama pada persiapan dalam pelaksanaan sebuah program segala sesuatu yang direncanakan pasti akan menghasilkan sebuah strategi kedepannya.

Menurut Tjokroamidjojo, B. (2006:28), perencanaan dalam pengertian yang paling luas adalah proses pengorganisasian operasi-operasi yang sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan memungkinkan penggunaan yang paling efektif dan efisien dari sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Perencanaan dalam program Madani BAZNAS Jawa Barat sudah tertata dengan jelas dan terstruktur. Perencanaan memungkinkan penggunaan yang paling efektif dan efisien dari sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Perencanaan dalam program Madani BAZNAS Jawa Barat sudah tertata dengan jelas dan terstruktur. Program Madani ini tidak memiliki batasan dalam merekrut para penerima bantuan program Madani. Baznas Jawa Barat menjelaskan bahwa terpenting masuk dalam 8 asnaf zakat, yang nantinya program ini bisa menaikan tingkat finansial dan spiritual para mustahik. Namun tentunya lebih jika nantinya para calon yang akan menerima program Madani ini yang sudah memiliki dasar dalam dunia peternakan.

Strategi pemberdayaan mustahik melalui peternak ini mendapat respon yang baik dikalangan masyarakat, sifat kooperatif dan mau berkembang menjadi

masyarakat berdaya dibuktikan dengan antusiasme keikutsertaan para anggota. Strategi yang digunakan dalam menarik minat para peternak mustahik dengan tidak membatasi para pendaftar, dengan demikian dibebaskan untuk para calon anggota mendaftar hingga pada proses berjalannya seleksi terpilihilah beberapa anggota yang layak sesuai dengan penilaian yang berlaku. Setelah proses seleksi yang berjalan maka pada pada periode tahun 2021 ini kuota yang ditetapkan oleh LPPM BAZNAS Jawa Barat sejumlah 10 (sepuluh) penerima bantuan, diantaranya:

Tabel 1 Dokumentasi penerima bantuan program madani periode 2021

Nama Lengkap	Kota/Kabupaten	Usia
Sutisna	Kabupaten Sumedang	56
Sarip Hidayat	Kabupaten Sumedang	39
Ipin Saripin	Kabupaten Sumedang	51
Dedi Permana	Kabupaten Sumedang	28
Nono Mulyana	Kabupaten Sumedang	53
Utep Hidayat	Kabupaten Sumedang	30
Udin Saepudin	Kabupaten Sumedang	58
Didih Permana	Kabupaten Sumedang	55
Yayat Rohyat	Kabupaten Sumedang	28
Wendan	Kabupaten Sumedang	28

Sumber : Panduan Program Balai Ternak 2021

Tabel 1. Dideskripsikan Anggota yang lolos telah melaksanakan Studi Kelayakan Peternak Mustahik (SKPM) dan penyaringan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan serta memenuhi syarat spesifik sesuai dengan penilaian dari pelatihan yang telah diberikan pada tanggal 10 Mei 2021. Dalam penyeleksian selama proses tersebut panitia program Madani memilih secara selektif agar dana yang disalurkan berjalan sesuai strategi yang telah direncanakan.

Strategi untuk dapat menarik para anggota yang dilakukan LPPM dalam menjalankan program ini yaitu dengan cara bekerja sama dan adanya sosialisasi dengan stakeholder setempat. Menurut pendapat Ridwanullah, A., & Herdiana, D (2018:95) sosialisasi sebagai bagian dari komunikasi yang dimaknai sebagai proses pengenalan program kegiatan kepada semua pihak yang terlibat baik masyarakat maupun stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kerja sama ini yang nantinya untuk menentukan orang siapa saja yang berhak menerima bantuan Program Madani ini. Kemudian hal lainnya dalam kerja sama dengan stakeholder ini juga bertujuan untuk menentukan lokasi yang tepat dalam mendirikan kandang dan hal teknis lainnya. Menurut Sedarmayanti (2009:280) mengungkapkan bahwa unsur-unsur pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori antara lain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Hal tersebut mengartikan bahwa dalam governance terdapat interaksi dari ketiga aktor tersebut yang tidak saling mendominasi satu sama lain, begitupun dalam penerapan proses pemberdayaan. Keterlibatan stakeholder setempat juga menjembatani pihak Baznas dalam melakukan kontrol serta berperan sebagai narahubung yang dilakukan oleh para penerima manfaat dengan Baznas jika sewaktu-waktu ada hal yang diluar rencana

Mendirikan Pra koperasi yang didirikan oleh LPPM Baznas Jawa Barat menjadi strategi jitu dalam menjaga kepercayaan dan kenyamanan anggota, dengan didirikannya pra koperasi bertujuan untuk lebih membuat para peternak/mustahik mandiri sehingga dapat mengetahui langkah apa saja yang perlu dilakukan agar dapat tercapai tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kemandirian dari segi finansial dan spiritual. Selaras dengan pendapat Subagyo, A. (2015) bahwa Koperasi merupakan Wadah dan Media yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kemandirian perekonomian masyarakatan suatu bangsa khususnya sebagai upaya dan langkah untuk menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, kesenjangan sosian dan tingkat kemiskinan.

Tahapan dalam Program Pemberdayaan Peternakan Mustahik di Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkreta Kabupaten Sumedang.

Fasilitator dan agen pemberdayaan masyarakat itu penting memahami pentingnya tujuan dan keuntungan tahapan dalam menyiapkan kegiatan dalam suatu program pembangunan masyarakat, agar cita-cita masyarakat benar-benar menjadi acuan utama bagi suatu perencanaan penerima manfaat.

Pertama, tahapan Social Mapping. Tahapan pertama ini LPPM melakukan rencana strategi jangka pendek dan rencana strategi jangka panjang. Rencana yang bakal terlaksana nanti disesuaikan kembali dengan dana yang dimiliki pihak baznas

itu sendiri. Menurut Suharto, E. (2007:54) social mapping didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematis, melalui tahapan, yang terencana serta melibatkan kolektif data dan informasi mengenai kondisi masyarakat termasuk didalamnya profil dan masalah-masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut.

Kedua, tahapan Pemberkasan dan Assesment. Pada tahap ini pihak LPPM melakukan validasi data dan seleksi kepada mustahik sebagai calon penerima bantuan program Madani ini. Seleksi mustahik ini lewat tahapan wawancara kepada para mustahik calon penerima bantuan, dalam wawancara tersebut berisi tentang menanyakan apakah para mustahik mempunyai pengetahuan dalam dunia peternakan. Selaras dengan pendapat Gillies, R. M., & Ashman, A. F. (2007) assesment adalah tahapan kedua dari proses perubahan berencana (planned changed). Fokus utama dari proses assesment adalah mendapatkan pemahaman mengenai suatu masalah, penyebabnya, apa yang bisa diubah untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah tersebut.

Ketiga, tahapan Inkubasi Pra Usaha. Tahapan ini pihak LPPM melakukan beberapa hal antara lain penguatan mental spiritual terhadap para mustahik, hal ini bertujuan untuk membekali para penerima bantuan yang nantinya bukan hanya finansial yang mapan namun spiritual juga yang lebih baik. Contoh kegiatan tersebut adalah dengan mengadakan pembinaan/seminar terhadap para mustahik mengenai manajemen budidaya dan usaha ternak domba. Hal ini bertujuan untuk membekali para mustahik agar lebih paham dan mengerti tentang peternakan sebelum diberikan aset produktif nantinya. Sejalan dengan pendapat Rue, L.W., & Lloyd L. B. (2000:272), bahwa Needs assessment adalah bagian dari proses perencanaan, sering digunakan untuk perbaikan pada individu, pendidikan/pelatihan, organisasi, atau masyarakat. Tindak lanjut dari needs assesment dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat, dengan mengidentifikasi masalah secara jelas, sumber daya yang terbatas dapat diarahkan mengembangkan dan menerapkan solusi yang layak dan tepat.

Keempat, tahapan Input Aset Produktif. Tahapan ini LPPM memberikan aset produktif kepada para mustahik sebagai penerima bantuan madani, aset produktif itu berupa domba indukan, domba ternak dan buku pedoman. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (capacity building) masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumberdaya fisik dan

non fisik yang diperlukan masyarakat. (Hadiyanti, P. (2008).

Kelima, Tahapan yang selanjutnya adalah Monitoring dan Evaluasi. Menurut Suharto, E. (2009) monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang telah selesai atau minimal telah berjalan selama tiga bulan. Setelah para mustahik diberikan aset produktif berupa domba, kandang dan buku pedoman. Tahapan ini LPPM membuat kuisisioner terhadap para mustahik sebagai penerima bantuan program. Kuisisioner ini dilakukan setiap dua minggu sekali, dalam kuisisioner ini berisi tentang apa kendala yang dialami para mustahik dalam menjalankan program Madani ini. Setelah implementasi program selesai, pada tahap ini fungsi evamon akan menilai secara keseluruhan (semua aspek) dari apa yang sudah dilaksanakan. Kesesuaian hasil implementasi dengan indikator-indikator program yang telah ditetapkan pada saat perencanaan program menjadi indikasi dalam proses penilaian tersebut, baik pada aspek administrasi, keuangan, maupun aspek tingkat kemanfaatan dari program (Ma'ruf, A., 2007:104).

Hasil dalam Program Pemberdayaan Peternakan Mustahik di Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkreta Kabupaten Sumedang.

Menurut Andeas, & Savitri, E. (2016:28), bahwasannya keberhasilan dalam pemberdayaan dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai hal tersebut terlihat dari hasil yang didapat yaitu masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, masyarakat memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial seperti menjadi masyarakat yang percaya diri, mampu menyampaikan pendapatnya, mampu membangkitkan dan membangun mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan yang membangun.

Prinsip dalam pemberdayaan merupakan acuan keberhasilan dalam proses menjalankan suatu program yang direncanakan. Merujuk pada pendapat Najiyati, S., dkk. (2005), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan yang diterapkan dalam sebuah prinsip suatu program. Dalam program pemberdayaan peternak mustahik, ke-empat prinsip yang menjadi landasan bagi para peternak atau keanggotaan menjadi kunci berjalannya program yang diusung oleh Baznas untuk masyarakat Kabupaten Sumedang.

Pertama, prinsip kesetaraan. Kesetaraan disini pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi calon penerima bantuan dari program Madani dengan tujuan agar penerima bantuan nantinya sesuai dengan kriteria yang ada dan tidak salah sasaran. Upaya yang dilakukan

pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat dengan bekerja sama dengan pihak stakeholder setempat. Pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat melakukan asesmen-assesment kepada calon penerima bantuan dari program Madani. Assesment itu meliputi bagaimana karakter calon penerima bantuan di kalangan masyarakat, bagaimana pendapatan yang diterima, bagaimana keadaan rumah, dan bagaimana cara dia bersosial di masyarakat. Menurut Subiyanto (1998), mengemukakan bahwa assesment merupakan penerapan praktis dari pengukuran atau cara memperoleh data melalui berbagai bentuk pengukuran di suatu masyarakat.

Kedua, prinsip partisipasi. Berbicara tentang partisipasi masyarakat sangat erat hubungannya dengan pemberdayaan, karena dalam setiap kegiatan pemberdayaan tidak akan berlangsung dengan baik dan optimal tanpa keikutsertaan warga masyarakat di dalam setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Atau dengan kata lain, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan proses, tahapan-tahapan dan pencapaian hasil kegiatan pemberdayaan. Partisipasi mustahik dalam Program Madani (Masyarakat Peternak Domba Mandiri) dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ternak yang sudah diberikan dari pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari mustahik untuk terus memelihara hewan ternak yang sudah diberikan agar manfaatnya dapat terus dirasakan.

Tingkat partisipasi mustahik dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil dari Program Madani (Masyarakat Peternak Domba Mandiri) sudah baik, karena pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat berpartisipasi dalam pengawasan dalam kegiatan di lapangan. Pengawasan yang dilakukan antara lain melakukan pendampingan setiap satu minggu sekali, dalam pembinaan kelompok peternak dilakukan oleh pendamping program dalam periode tertentu sesuai dengan lama program berjalan. Pembinaan rutin pada saat rapat/pertemuan mustahik pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat memberikan materi dan pemahaman teknis budidaya peternakan secara umum, serta menambah pengetahuan tentang recording, kesehatan, sosial, agama, muamalah, manajemen usaha, kendala/masalah, administrasi dan keuangan, serta produk turunan ternak dan lain-lain.

Partisipasi yang dilakukan secara langsung dan melibatkan anggota secara aktif juga sebagai salah satu keuntungan yang didapatkan LPPM Baznas dalam proses evaluasi dalam kinerja program, keterlibatan anggota secara langsung menjadi jalan yang transparan antara pihak BAZNAS dan para peternak mustahik. Keterlibatan masyarakat secara aktif juga menjadi salah satu landasan yang harus dikuasai saat melakukan sebuah program pemberdayaan, dan hal tersebut diterapkan dengan baik oleh para fasilitator LPPM Baznas Jawa Barat khususnya di Kabupaten Sumedang. Senada dengan pendapat Adenansi, D., dkk. (2015:350),

bahwa partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan. Keterlibatan sukarela itu bisa berupa terlibat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan, terlibat dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program dan terlibat dalam memilih hasil dan manfaat program secara menyeluruh.

Ketiga, prinsip keswadayaan. Banyak program pemberdayaan di masyarakat yang bersifat caritas, atau membagi-bagikan bantuan secara cuma-cuma. Agenda ini dalam praktiknya jauh lebih dominan dari pada bantuan yang bersifat penguatan kapasitas dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan. Hal ini bisa dipahami bahwa, bantuan yang bersifat caritas langsung dapat dinikmati oleh mustahik yang mendapatkan bantuan. . Sementara itu, bantuan yang bersifat penguatan kapasitas cenderung berproses secara lambat dan tidak langsung kelihatan hasilnya.

Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan dari pada bantuan yang bersifat caritas. Dukungan dari LPPM ini hanya bersifat stimulant, sedangkan sumber daya utama untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari mustahik itu sendiri. Upaya menumbuh kembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan. Selaras dengan yang di ungkapkan oleh Ayuningrat, S. (2020:12) bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Keempat, Keberlanjutan pada prinsip ini pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat tentunya memiliki metode-metode yang dijalankan untuk menjaga kestabilan program Madani. Sama seperti yang sudah dijelaskan pada prinsip diatas pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat melakukan pendampingan dan menjalankan kuesioner kepada mustahik sebagai penerima bantuan Program Madani. Pendampingan dan kegiatan kuisisioner ini dilaksanakan satu minggu sekali dalam kegiatan ini bertujuan untuk saling terbuka antara pihak pengurus Program Madani yaitu pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat dengan penerima bantuan Program Madani.

Kemudian pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat mempunyai upaya lain dalam menjaga keberlanjutan dari Program Madani, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi setiap satu bulan sekali terhadap program Madani. Monitoring dan

evaluasi Program Madani meliputi apa kendala-kendala di lapangan, bagaimana program yang sudah jalan, apa yang harus diganti maupun diubah dan yang tidak kalah penting membahas rencana selanjutnya atau inovasi kedepan untuk Program Madani. Keberlanjutan ini tentunya merupakan perencanaan yang perlu diperhatikan secara matang, karena dalam proses pemberdayaan masyarakat keberlangsungan suatu program yang terus berjalan meskipun sudah lepas dari pengawasan fasilitator 69 harus terus berjalan, oleh sebab itu sebelum benar-benar selesai program ini yang masih dibawah pengawasan LPPM Baznas, para fasilitator harus memastikan jika para mustahik sudah benar-benar mandiri dan dapat menemukan solusi secara tanggap apabila sewaktu-waktu ada hal-hal yang terjadi dan program tetap dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Pada hakikatnya tujuan dalam sebuah pemberdayaan menurut Sulistiyani, (2004: 80) adalah untuk menciptakan dan membentuk masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud meliputi kemampuan berpikir, melakukan tindakan dan pengendalian sosial atas apa yang hendak mereka lakukan. Oleh karena itu, LPPM dengan program Madani secara tidak langsung berperan dalam memberikan edukasi dan pembiasaan pada masyarakat bahwa melalui program-program yang dilaksanakan sehingga dapat menanamkan pada masyarakat bahwa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dapat bernilai secara materi maupun non-materi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan di LPPM BAZNAS Jawa Barat dalam Program Madani peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai program Madani yang dilaksanakan di Dsa Cipanas Kabuapten Sumedang.

Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Peternakan Mustahik di Kabupaten Sumedang. Strategi yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada bidang membangun program besar yang bersifat tangible dan sustainable, meluncurkan program yang berkonsentrasi pada pengentasan kemiskinan, melakukan inovasi program penyaluran, serta membuat sistem dan prosedur yang jelas terkait penyaluran dana zakat.

Tahapan dalam Program Pemberdayaan Peternakan Mustahik di Kabupaten Sumedang. Program Madani di Desa Cipanas Kabupaten Sumedang memiliki beberapa tahapan sebelum, sesaat dan sesudah program dijalankan. Tahapan tersebut antara lain, Social Mapping, pemberkasan Assessment, inkubasi pra usaha, input aset produktif dan monitoring evaluasi. Tahapan-tahapan ini tentunya melalui waktu yang tidak sebentar, pihak LPPM BAZNAS Jawa Barat membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua bulan dalam mempersiapkan

Program Madani.

Hasil dalam Program Pemberdayaan Peternakan Mustahik di Kabupaten Sumedang. Dalam program pemberdayaan peternak mustahik, ada empat prinsip yang menjadi landasan bagi para peternak atau mustahik menjadi kunci berjalannya program yang diusung oleh Baznas untuk masyarakat Kabupaten Sumedang. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan dan prinsip keberlanjutan. Hasil dari program ini mustahik mampu mewujudkan tiga prinsip swasembada, yaitu keberdayaan ekonomi, pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan mental serta spiritual.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk LPPM agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi kedepannya yaitu: Kehadiran Program Madani di tengah masyarakat khususnya di Desa Cipanas harus lebih dikembangkan dalam aspek pendanaan dan pendistribusiannya karena masyarakat banyak yang merasakan manfaat dari program tersebut. Program Madani harus terus dioptimalkan dan dikembangkan agar peran BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin luas dan masyarakat semakin merasakan dampak manfaat dari adanya Program Madani LPPM BAZNAS Jawa Barat. Kemudian bagi penerima manfaat Program Madani agar lebih inovatif dan kreatif dalam mengelola dan mengembangkan bantuan pemberdayaan sehingga kesejahteraan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenansi, D., Zainuddin, M., & Rusyidi, B. (2015). Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3).
- Aflah, N. (2009). *Arsitektur Zakat Indonesia_Dilengkapi dengan Kode Etik Zakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ahmada, Z. R. (2019). *Model pemberdayaan peternak sapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Wilayah Kroya : studi di Desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Andeas, & Savitri, E. (2016). *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir*. Pekanbaru: Pustaka Sahila Yogyakarta.
- Anwar, C. (2021). *Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun*. Skripsi. IAIN Ponorogo.
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Ayuningrat, S. (2020). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Potensi Lokal Di Komunitas Warga Peduli Lingkungan Depok (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Azhari, M. T., Al Fajri Bahri, M. P., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). Metode penelitian kuantitatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Aziz, R. (2010). *Dakwah Dalam Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Muslim*. Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(16), 117-142.
- Gillies, R. M., & Ashman, A. F. (2007). Cooperative learning. *Cooperative Learning: Integrating Theory and Practice*. Available online also at: <http://doi.org/10.4135/9781483329598>.
- Hadiyanti, P. (2008). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui program keterampilan produktif di PKBM Rawasari, Jakarta Timur. *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(IX), 90-99.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CDES.
- Ma'ruf, A. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.
- Manshur, F. (2009). *Pemeliharaan ternak secara ilmiah, tepat dan terpadu*. Bandung: Nuansa.
- Munir, B. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Edisi Pertama*. Mataram: Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forest and peatlands in Indonesia. *Wetlands Intl. Indonesia Prog. dan Wildlife Habitat Canada. Bogor*.
- Purnamasari, S. D., & Ma'ruf, M. F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Bumdes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). *Publika*, 8(5).
- Ridwanullah, A., & Herdiana, D. (2018). *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82-98.
- Rue, L.W., & Lloyd L. B. (2000). *Management Skills and Application. Edisi ke-9*. McGraw-Hill, Inc.
- Sastropoetro, A. S. (1988). *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: Alumni.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Subagyo, A. (2015). *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Subiyanto. (1998). *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukaris, S. (2019). Social-Mapping Sebagai Landasan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 2(1), 52-61.
- Sukirno, S. (2002). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., Mardikanto, (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Zuhru, H. (2011). *Kemitraan Ayam Pedaging Antara Perusahaan PT Patriot dengan Peternak di Desa Besowo Kec. Kepung Kab. Kediri Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi, Kediri: STAIN Kediri.
- Zulpikri, R. (2022). *Analisa Capaian Pembangunan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Dana Desa*. Skripsi. IAIN Walisongo.

